

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah adalah wewenang yang di miliki daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya di selenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengidentifikasi bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini di harapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut di harapkan dapat di raih melalui otonomi daerah. Dalam peningkatan kemandirian pemerintah tersebut dapat di lihat dan di wujudkan dari pembangunan- pembangunan yang di laksanakan oleh daerah. Pembangunan itu sendiri tidak dapat berjalan jika tidak ada perencanaan yang baik dan matang salah satunya yaitu perencanaan dalam bidang keuangan tahunan yang di buat. Perencanaan keuangan tahunan ini yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD). APBD berfungsi untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan di wujudkan dalam bentuk proyek – proyek, sehingga APBD berfungsi untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mencari dana dan juga kegiatan – kegiatan yang sifatnya membelanjakan dana (Ibnu Syamsi, 1998 : 205).

Pada sisi penerimaan atau kegiatan yang sifatnya mencari dana (pendapatan), terdapat sumber penerimaan meliputi: Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan penerimaan lainnya. Pada pos pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PAD meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain. Pada pos dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi unsur – unsur : bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus. Pada pos pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau kenikmatan lain sehingga daerah tersebut di bebani kewajiban untuk membayar kembali. Pada pos penerimaan lain adalah yang sifatnya

memperoleh dana selain pos – pos di atas.(S.Baldric dan S.Bonni, 2001 : 395).

Pada sisi pengeluaran atau kegiatan yang sifatnya mengeluarkan dana (Pendapatan), terdapat pos pengeluaran rutin atau belanja rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran saja dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah contoh : Belanja Pegawai, Belanja barang dll. Sedangkan Pengeluaran Pembangunan merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya oprasional dan pemeliharannya.(Halim, 2002 : 76). Contohnya : Dana Pendidikan dan Kesehatan.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan tentang pokok – pokok pemerintah daerah, di tetapkan bahwa unsur – unsur dari pendapatan asli daerah adalah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan lain – lainnya yang sah akan sangat menunjang dan menentukan adanya otonomi daerah. Pendapatan asli daerah sebenarnya memang sangat di harapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan–kegiatan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat di biayai dengan pendapatan asli daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonominya.

Untuk itu perlu di adakan penelitian terhadap setiap macam pendapatan asli daerah.

B. Perumusan Masalah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah itu sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasarat atau keterkaitan dan pendukung pelaksanaan dalam Sistem Pemerintah Daerah.

Setelah melakukan penelitian pendahuluan dan mengkaji awal tentang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember sebelum dan setelah otonomi daerah?
2. Untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan setelah otonomi daerah.
3. Apakah factor terbesar yang sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah setelah adanya otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana sebelum dan setelah adanya otonomi daerah mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2004
2. Untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana sebelum dan setelah otonomi daerah mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2004.
3. Untuk mengetahui kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Jembrana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jembrana Bali
2. Bagi Pemerintah Daerah
Memberikan masukan mengenai keadaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jembrana sehingga dapat bermanfaat bagi usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong potensi-potensi sumber pendapatan yang masih belum maksimal

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan bahan informasi yang berguna dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jembrana.